

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Konsep administrasi yang diidentikan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis, dalam studi administrasi dikonsepsikan sebagai administrasi sebagai arti sempit. Pada konteks ini konsep administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketata usaha atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya (Zulkifli, 2009;21).

Administrasi itu ialah suatu kegiatan atau aktifitas kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama secara efektif atau optimal, sedangkan menurut Simon administrasi adalah kegiatan dari kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama (dalam Athoillah, 2013;132).

Administration yang berasal dari Bahasa Inggris sering kita sebut dengan administrasi dalam arti luas, yakni proses (rangkai) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien (Wirman Syafri, 2012;4)

Menurut Sondang P. Siagian (2008) dalam Wirman Syafri (2012;9) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hadari Nawawi dalam Inu Kencana Syafii (2003;5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara terminologi apa yang disebut “Administrasi” dalam Faried Ali (2001;19) adalah mengurus, mengatur, mengelola.

Kemudian administrasi menurut terry (*dalam* M.Fais satrianegara - sitti saleha, 2009:10) mengartikan administrasi sebagai upaya mencapai tujuan yang telah di tetapkan dengan menggunakan orang lain.

Menurut Syafri (2012:4-5) administrasi dalam artian luas, yakni : Proses (rangkaian) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dengan demikian, dalam pengertian administrasi terkandung hal-hal berikut:

- a. Kelompok orang (manusia), yakni berkumpulnya dua orang atau lebih dalam sebuah perkumpulan (organisasi), organisasi sipil atau militer, negeri atau swasta, organisasi besar atau kecil. Pengelompokan orang dalam suatu kerja sama tersebut terjadi dengan asumsi bahwa tujuan yang ingin dicapai tidak dapat dilakukan seorang diri.
- b. Kegiatan, yakni berupa sejumlah aktivitas yang harus dikerjakan baik secara individual, namun masih terkait dengan kegiatan orang lain, ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka administrasi

merupakan kegiatan yang berangkaian satu dengan yang lain sehingga merupakan suatu proses yang sistematis atau suatu sistem yang bulat padu.

- c. Kerja sama, yakni interaksi antar individu dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu pekerjaan karena pekerjaan itu tidak dapat dan juga tidak boleh diselesaikan (dituntaskan) seorang diri.
- d. Tujuan, yakni sesuatu yang ingin didapatkan/dicapai oleh kelompok orang yang bekerjasama tersebut dan biasanya berupa kebutuhan bersama yang tidak bisa diraih seorang diri.
- e. Efisiensi, yakni perbandingan terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output).

Disamping itu, dalam pengertian luas administrasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang, sehingga menghasilkan 3 pengertian menurut sudut pandangnya masing masing oleh Anggara (2012;20) yaitu :

- a. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan sehingga pelaksanaan kerja dan tujuan yang dimaksudkan tercapai.
- b. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi, dan sebagainya.

- c. Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari ketiga definisi di atas, adapun orang-orang pengisi organisasi yang dimaksud dalam 3 definisi menurut Anggara (2012;21) adalah sebagai berikut :

- a. Administrator : orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan.
- b. Manajer : orang yang berlangsung memimpin pekerjaan kearah tercapainya hasil yang nyata.
- c. Pembantu Ahli : terdiri atas para ahli dalam setiap bidang, selaku penasihat (brain-trust) dan berfungsi di bidang karyawan.
- d. Karyawan : para pelaksana dan pekerja yang digerakan oleh manajer untuk berkerja, guna menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan.

2. Konsep Organisasi

Konsep organisasi (organization) nampaknya merupakan titik sentral dari maksud dan tujuan diaplikasikannya setiap aspek studi administrasi.

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan (Wirman Syafri, 2012;12).

Sejalan dengan itu menurut Robbins, organisasi adalah suatu entitas sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih dengan

batasan yang relatif teridentifikasi, yang berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan seperangkat sasaran bersama (dalam Torang, 2013;25)

Menurut Bernard (dalam Thoha, 2008:167) organisasi adalah suatu sistem kegiatan-kegiatan terkoordinasi secara sadar , atau suatu kegiatan dari dua manusia atau lebih.

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan, dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas (Zukifli, 2009;14).

Dalam sistem kerja sama tersebut disamping diadakan pembagian kerja yang dijabarkan ke dalam perincian tugas, menurut Soffer (1973;220) juga diikuti dengan tindakan pendistribusian peranan kepada setiap anggota untuk melaksanakan rincian tugas tertentu dalam rangka upaya menghasilkan beberapa bentuk produk (dalam Zulkifli, 2009;14).

Menurut Waldo (dalam sarwoto, 1991:15) menyatakan bahwa organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang formal dan kebiasaan-kebiasaan didalam suatu sistem dalam administrasi dapun pengertian organisasi dalam arti statis sebagaimana dikemukakan oleh Nawawi (20008:8) bahwa :

Organisasi dalam pengertian statis adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa sifat statisnya terletak pada dua kondisi yaitu : setiap organisasi memiliki struktur yang cenderung tidak berubah-ubah serta posisi, status, dan jabatan setiap individu cenderung permanen.

Selanjutnya pengertian organisasi dalam arti dinamis juga di kemukakan oleh Nawawi (2008:9) bahwa :

Organisasi adalah proses kerjasama sejumlah manusia (dua orang atau lebih) untuk mencapai tujuan bersama.dari pengertian tersebut terlihat bahwa sifat dinamisnya sebuah organisasi terletak pada dua kondisinya yaitu kerjasama berlangsung secara berkelanjutan, sebagai rangkaian kegiatan atau proses yang selalu mungkin menjadi lebih efektif dan efisien dan sebaliknya juga semakin berkurang efektif dan efisien, serta interaksi antara manusia formal dan informal di dalam organisasi, tidak pernah sama dari waktu ke waktu.

Jadi jelas sudah bahwa organisasi merupakan suatu wadah atau tempat kegiatan berlangsung bagi orang-orang yang bekerja didalamnya yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan secara bersamaan. Suatu organisasi terdapat tugas, fungsi, tanggung jawab serta wewenang yang ada di dalamnya, agar kerja orang-orang didalamnya terlaksana dengan jelas dan terstruktur secara sistematis.

Menurut Siswanto (2005:73) organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama.

Adapun konsep organisasi menurut Kast dan James E. Rosenzweig (2002; 21) (dalam Ismail Nawawi Uha, 2010; 2), bahwa kita membutuhkan suatu definisi umum dan sebuah model konseptual mengenai organisasi yang cocok untuk semua jenis kecil dan besar, informal dan formal, sederhana dan kompleks, dan organisasi yang melaksanakan berbagai aktivitas dan fungsi. Dalam hubungan ini organisasi didefinisikan sebagai berikut :

- (1) Suatu subsistem dari lingkingannya yang lebih luas.
- (2) Semua pengaturan yang berorientasi pada sasaran orang dan tujuan yang meliputi.

- (3) Suatu sub sistem teknik, orang yang memakai pengetahuan, teknik, peralatan, dan fasilitas.
- (4) Suatu subsistem struktur, orang yang kerja sama dalam aktivitas terpadu.
- (5) suatu subsistem psikososial, orang dalam hubungan sosial.
- (6) Subsistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan semua usaha.

Berdasarkan definisi organisasi yang dikemukakan diatas, memberikan informasi bahwa organisasi itu sendiri atas dua bagian besar, yaitu:

- (1) Organisasi sebagai wadah atau tempat, subsistem.
- (2) Organisasi sebagai proses yang menggambarkan aktivitas yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan oleh manusia yang bergabung dalam sebuah organisasi sosial.

3. Konsep Manajemen

Dalam Hasibuan Melayu S.P (1996:1) Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu.

Manajemen menurut Waluyo (2007:5) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarah dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kemudian untuk melakukan proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian itu maka di butuhkan orang

yang mampu mengatur semuanya, seperti yang disampaikan oleh Athoillah (2013;14) bahwa manajemen itu adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan di dukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksana tujuan tertentu diselenggarakan dan dikendalikan (dalam Issakh dan Wiryawan, 2015;1).

Definisi konsep manajemen yang menunjukkan secara eksplisit esensialnya penataan terhadap sumberdaya organisasi, tergambar pada rumusan yang dikemukakan oleh The Liang Gie (1993;14) (dalam Zulkifli, 2009; 16). Menurutnnya, manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai.

Dalam Suwatno dan Donni Juni Priansa (2011: 16) Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu: *Men, Money, Methode, Material, Machine, dan Market*.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (1995:9) manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Sedangkan Nawawi (2008 :40) menengahkan 3 (tiga) pengertian sumber daya manusia sebagai berikut :

1. SDM adalah Manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
2. SDM adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. SDM adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non-material/non-finansial) dalam organisasi yang dapat di wujudkan menjadi potensi nyata (*raal*) secara fisik dan non- fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan sebuah organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi yang manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis (Samsudin, 2010;22).

McMahon (*dalam* pendit, 1999:86) mengemukakan bahwa sumber daya manusia adalah bentuk termahal dari sumber daya kesehatan, yang merupakan salah satu alasan mengapa manajemen harus menjaga agar seluruh staf kesehatan dapat mempertahankan kualitas kerja yang tinggi.

Dalam Sule Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah (2005:194) manajemen sumber daya manusia bisa didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya.

Kemudian Amirullah (2004;206) mengemukakan manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan kompensasi, integritas, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga melalui proses-proses manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

5. Konsep Pelaksanaan Tugas

Menurut Nugroho (2006;3) Tugas adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan berdasarkan perananan jabatan maupun kedudukan untuk mencapai nilai-nilai dan arena itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah .

Menurut Winardi (2003;26) tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Siagian (1997;126) pelaksanaan tugas adalah “suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada”.

Amstrong, Michael (dalam Denur 2005:2) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas ialah usaha dalam mendapatkan hasil optimal, sebagaimana yang diharapkan serta memerlukan kualitas sumber daya manusia (pimpinan dan karyawan) yang dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Konsep Kewenangan

Marbun (dalam Sinamo, Nomensen 2015;97) menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang mana segala sesuatu tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan harus berdasarkan peraturan yang ada.

Dalam Soekanto dan Budi Sulistyowati (2013:242) wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan peretentangan-pertentangan.

7. Konsep Desa

Pengertian Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Sri Maulidiah (2014 : 347) adalah : (1) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan; kampung; dusun; (2) udik atau dusun (dalam arti) daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat; tanah; daerah.

Sedangkan Desa menurut Suhartono (2000 : 12) dalam Sri Maulidiah (2014 : 348) , bahwa; “desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar dibidang sosial ekonomi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah melalui pasal 1 diatur tentang pengertian Desa yaitu Kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Rahyunir dan Maulidiah (2015;14) Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri.

8. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soemantri (dalam skripsi Sadam 2014;25), pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa, sedangkan perangkat Desa terdiri dari Sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretaris Desa, pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

9. Konsep Pembinaan

Pembinaan menurut Efendi (2003;24) adalah pembinaan dalam rangka perbaikan dan pembaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek kehidupan tertentu secara langsung termasuk didalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.

Dalam Foster dan Karen R. Seeker (2001:1) pembinaan (*coaching*) adalah upaya berharga untuk membantu orang lain mencapai kinerja puncak. Tidak diragukan lagi, organisasi yang cerdas dan para manajer yang cerdas pasti telah mengadopsi teknik pembinaan ini.

Menurut Thoha (1993:7) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Pembinaan menurut Santoso, (1995:52) dalam Nurkhairi Amri (2015:18) adalah usaha pemelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi.

Menurut Santoso, (1995:57) dalam Nurkhairi Amri (2015:18) pembinaan dapat dilakukan dengan penyuluhan, pengarahan, dan bimbingan.

1. Penyuluhan

Mardikanto (1987) penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan, penyuluhan tidak sekedar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan kepala desa dalam upaya mensosialisasikan kegiatan dan menentukan kegiatan yang dilakukan secara bersama antara pemerintahan dan masyarakat agar menumbuhkan semangat maju mencapai kehidupan yang lebih baik adapun item penilaiannya adalah membuat program penyuluhan, mengadakan pertemuan dikusi dan musyawarah yang dibuat kepala desa untuk membahas suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama, melaksanakan program yang telah dibuat, mengevaluasi program dari hasil tersebut.

2. pengarahan

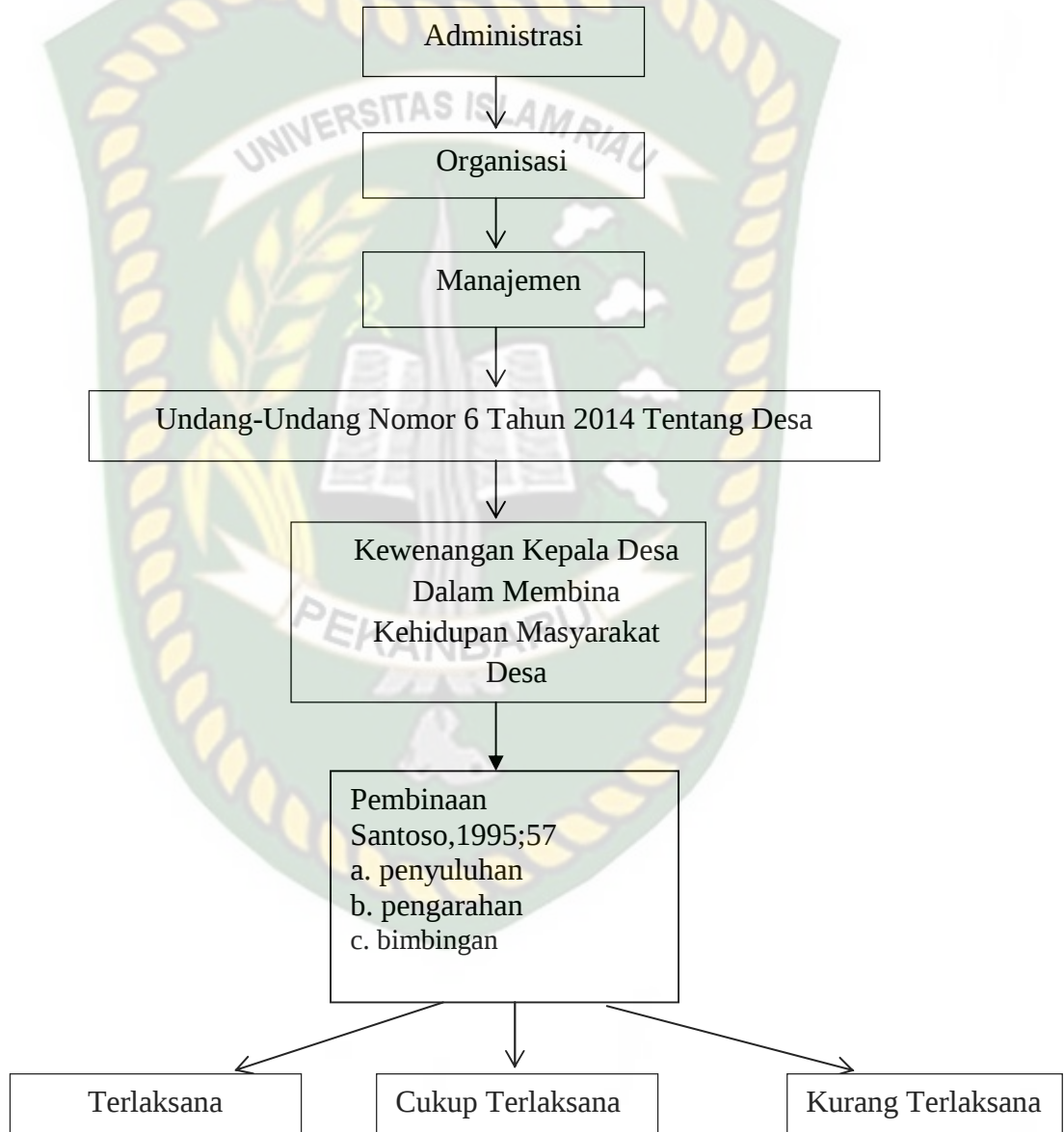
Menurut Sauredan Dislainer (dalam Wanadiana 2010) pengarahan merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu, atau instruksi resmi seseorang pimpinan kepada bawahannya berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan kepala desa untuk memberi pengarahan dan intruksi kepada aparatur desa dan masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Adapun item penilaiannya adalah memberikan arahan yang berhubungan dalam bidang pemerintahan desa dan mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa.

3. Bimbingan

Bimbingan menurut Hasibuan (2006;184) adalah kegiatan yang dilakukan pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Dalam hal ini kepala desa melakukan bimbingan, menggerakkan dan mengatur kegiatan yang tujuannya membina kehidupan masyarakat desa dengan cara persuasive atau bujukan dan intruktif tergantung cara yang mana yang paling efektif. Adapun indikator bimbingan adalah memberikan bimbingan dan motivasi kepada aparatur desa dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, menggerakkan kegiatan yang membina kehidupan masyarakat, mengatur kegiatan yang membina kehidupan masyarakat.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Model kerangka pikir penelitian tentang analisis pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber : Modifikasi Penulis Berdasarkan Dari Teoritis, Tahun 2018

C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa data penelitian ini tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, maka penulis perlu menjelaskan konsep operasional dengan mengoperasionalkan batasan sebagai berikut:

1. Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
4. Pelaksanaan Tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.
5. Kewenangan adalah kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang mana segala sesuatu tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan harus berdasarkan peraturan yang ada.

6. Pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-bener tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Operasional Variabel

Operasional Variabel dari Analisis Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1: Operasional Variabel Dari Analisis Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Pembinaan menurut Santoso, 1995:60 adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi.	Membina Kehidupan Masyarakat Desa	1. Penyuluhan	a. membuat program penyuluhan b. adanya pertemuan, diskusi dan musyawarah c. melaksanakan program yang telah dibuat d. keikutsertaan dan partisipasi	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang terlaksana
		2. Pengarahan	a. memberikan intruksi b. tepatnya pemberian intruksi	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang terlaksana
		3. Bimbingan	a. memberikan bimbingan, pedoman dan motivasi b. menggerakkan kegiatan yang membina kehidupan masyarakat	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang terlaksana

1	2	3	4	5
			c. mengatur kegiatan yang membina kehidupan masyarakat	

Sumber : Modifikasi Penulis 2018

E. Teknik Pengukuran

Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, maka dapat ditetapkan ukuran untuk variabel (indicator) seperti uraian berikut:

Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat indikatornya terlaksana dengan persentase antara 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat indikatornya terlaksana dengan persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat indikatornya terlaksana dengan persentase 0%-33%

Adapun pengukuran indikator masing-masing sebagai berikut:

1. Penyuluhan

Terlaksana : Apabila semua sub indikator terlaksana oleh kepala Desa dengan persentase 67%-100%

Cukup telaksana : Apabila hanya sebagian sub indikator yang dapat dilaksanakan oleh kepala Desa dengan persentase 34%-66%

Kurang terlaksana : Apabila tidak ada satupun sub indikator yang terlaksana dengan persentase 0%-33%

2. Pengarahan

Terlaksana : Apabila semua sub indikator terlaksana oleh kepala Desa dengan persentase 67%-100%

Cukup telaksana : Apabila hanya sebagian sub indikator yang dapat dilaksanakan oleh kepala Desa dengan persentase 34%-66%

Kurang terlaksana : Apabila tidak ada satupun sub indikator yang terlaksana dengan persentase 0%-33%

3. Bimbingan

Terlaksana : Apabila semua sub indikator terlaksana oleh kepala Desa dengan persentase 67%-100%

Cukup telaksana : Apabila hanya sebagian sub indikator yang dapat dilaksanakan oleh kepala Desa dengan persentase 34%-66%

Kurang terlaksana : Apabila tidak ada satupun sub indikator yang terlaksana dengan persentase 0%-33%